

**Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin
di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

FITRIA RAMADAYANI di Bimbing oleh ZAILI RUSLI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277

Abstract : *Decentralization in Kampar district in recent years greatly influence anti-poverty programs. Such empowerment of the poor, namely Raskin. National programs in direct contact with the community to tackle poverty with the goal of helping expenditure Penerima Target Households Benefit (RTS-PM) with food needs in the form of rice. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Raskin program in sub Desa Jaya Kubang Siak Hulu Kampar regency. The theory used in this study is the theory advanced by Mulyasa and Steers. This study uses descriptive qualitative data collection techniques of observation, interviews, and research informants were determined by purposive sampling technique. From the results of a descriptive qualitative data analysis found that the effectiveness of the implementation of the Raskin program in sub Desa Jaya Kubang Siak Hulu Kampar regency yet effective. It can be seen from, not the achievement of objectives and the expected rate of change in the national program, as well as the absence of tough sanctions for violators of regional regulation. In this research note the factors that influence the effectiveness of the implementation of the Raskin program in sub Desa Jaya Kubang Siak Hulu Kampar district include organizational factors that are still not going well, then factor Implementing inadequate in terms of quality and quantity.*

Keywords : *Effectivity, Raskin Program and Implementation.*

Kemiskinan telah menjadi masalah yang serius sejak sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997. Krisis ekonomi memang telah menimbulkan dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terutama beras. Angka kemiskinan yang ada di Indonesia sekarang ini masih sangat tinggi. Bahkan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, menurut data Asian Development Bank (ADB) Tahun 2008 angka kemiskinan Indonesia mencapai 40,4 juta, tahun 2010 mencapai 43,1 juta dan di tahun 2011 bertambah 2,7 juta menjadi 45,8 juta. Karena itu, persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini bukan lagi mengelola dampak dari krisis ekonomi tetapi lebih pada bagaimana memberantas kemiskinan. (tribunlampung.co.id)

Sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya. OPK memberikan subsidi beras secara *targeted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada Tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan

sasaran yaitu berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg/netto di Titik Distribusi.

Efektifitas program raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementerian/ lembaga terkait baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan dilandasi pemahaman bahwa raskin adalah hak orang miskin. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan program raskin memiliki kewajiban untuk menyampaikan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah ditetapkan BPS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program raskin.

Kebijakan pemerintah tentang Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin, dimana kriteria warga miskin yang memperoleh raskin berdasarkan data Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-08) BPS serta hasil musyawarah desa.

Pada tahun 2012 telah dilakukan perubahan data atau verifikasi data mengenai penetapan pagu alokasi beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) per kecamatan, desa/kelurahan se-kabupaten Kampar periode bulan Juni s/d Desember tahun 2012. Berikut disajikan tabel penetapan pagu alokasi raskin per desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar:

Tabel
Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kecamatan Siak Hulu
Per- Desa Periode Juni s/d Desember
Tahun 2012

NO	DESA/ KELURAHAN	RTS	PAGU ALOKASI	
			KUANTUM/BULAN (Kg)	Juni/Desember (Kg)
1	2	3	4	5
1	Pangkalan Baru	120	1,800	12,600
2	Buluh Cina	125	1,875	13,125
3	Desa Baru	350	5,250	36,750
4	Lubuk Siam	157	2,355	16,485
5	Teratak Buluh	107	1,605	11,235
6	Buluh Nipis	99	1,485	10,395
7	Pandau Jaaya	750	11,250	78,750
8	Tanah Merah	284	4,260	29,820
9	Tanjung Balam	54	810	5,670
10	Kubang Jaya	317	4,755	33,285
11	Pangkalan Serik	64	960	6,720
12	Kepau Jaya	93	1,395	9,765
	JUMLAH	2,520	37,800	264,600

Sumber Data: BULOG Kabupaten Kampar

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat penambahan jumlah alokasi raskin yang diterima masing-masing desa di kecamatan Siak Hulu. Terutama Desa Kubang Jaya pada tahun 2011 jumlah rumah tangga sasaran hanya 232 RTS dengan kuantum beras perbulan 3.480 kg, namun pada tahun 2012 terjadi penambahan rumah tangga sasaran yaitu menjadi 317 RTS dengan kuantum beras yang diperoleh sebesar 4.755 Kg. Jika diperhatikan terdapat 85 rumah tangga sasaran penerima manfaat baru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rumah tangga miskin di Desa Kubang Jaya bertambah.

Namun kenyataannya berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa gejala mengenai pelaksanaan program raskin kepada warga sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan pengelola salah sasaran dalam menyalurkan raskin kepada masyarakat, dimana masyarakat yang mampu juga ikut memperoleh Raskin. (berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan dan hasil wawancara dengan salah satu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Desa Kubang Jaya).
2. Tidak efektifnya waktu pembagian raskin, berdasarkan hasil wawancara dengan penerima raskin.
3. Adanya perbedaan jauh antara harga beras di titik distribusi (Rp. 1600/kg) dengan harga beras di titik bagi (Rp. 2600/kg).
4. Tidak tepatnya jumlah raskin yang diterima RTS-PM, yang efektifnya 15Kg/ bulan. Namun yang terjadi 8kg/3 bulan. (berdasarkan hasil wawancara dengan penerima raskin dan pengamatan langsung dilapangan).

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa untuk mengetahui sesuatu itu efektif, dapat dilihat dari : 1). Tercapainya tujuan kebijakan 2). Tercapainya sasaran kebijakan 3). Ketepatan waktu pelaksanaan (**Mulyasa, 2002**) 4). Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan disosialisasikan kepada organisasi atau publik, 5). Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, 6). Sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan 7). Bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Untuk itu dalam penulisan ini, penulis melihat efektivitas pelaksanaan prgram raskin dalam batasan masalah tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai pedoman pelaksanaan yang menjadi indikatornya adalah:

1. Target Program Raskin : rumah tangga sasaran yang memperoleh raskin adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Indikator jumlah beras yang dibagikan : jumlah beras yang dibagikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 2011, yaitu sebesar 15Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180kg/RTS/tahun. Desa Kubang Jaya pada tahun 2012 periode Juni sampai dengan Desember yaitu sebesar 4,755 Kg/bulan dan 317 rumah tangga sasaran penerima manfaat.
3. Indikator waktu pembagian : waktu pembagian raskin sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 2012 yaitu waktu pembagian raskin ke rumah tangga sasaran yaitu diberikan 1 kali untuk satu bulan atau sesuai waktu rencana distribusi, dengan ketentuan RTS-PM telah melunasi harga tebus raskin.

4. Indikator harga tebus beras : harga tebus raskin sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 20122 yaitu sebesar Rp 1.600,00/Kg netto di titik distribusi. Beras raskin ini merupakan beras yang disubsidi pemerintah sehingga menjadi murah

Kemudian untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu organisasi, tidak sedikit pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya menurut **Steers (1985: 209)**, kerangka kerja yang dipakai dalam empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektifitas yaitu : faktor organisasi, lingkungan, pekerja, serta kebijakan.

Jadi berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa sedikitnya terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu kebijakan yaitu faktor organisasi, faktor lingkungan, faktor pekerja dan faktor kebijakan. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan, yaitu : 1). faktor organisasi dan 2). faktor pelaksana. Hal ini disebabkan faktor kebijakan merupakan bagian dari organisasi dan faktor lingkungan merupakan bagian dari faktor pelaksana.

Dari uraian diatas mengandung pengertian bahwa penulisan ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang dikaji dengan menggunakan Teori Mulyasa dan Steers.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Pemilihan desain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diambil sebagai sampel pada penelitian. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah : (1) Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas, (2) dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, (3) dapat membimbing penemuan tak diduga sebelumnya, dan (4) dapat melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi ke lapangan sebagai informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian Efektivitas pelaksanaan program raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Informan penelitian diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam teknik ini siapa yang diambil sebagai informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang disesuaikan menurut maksud dan tujuan penelitian.

Selanjutnya, prosedur pemecahan masalah yang diteliti memaparkan hasil informasi yang didapat melalui wawancara dan pengamatan lapangan, serta studi kepustakaan, selanjutnya setelah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka informasi tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yakni informasi hasil wawancara dengan teori dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ditambahkan dengan data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

HASIL

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal kebijakan, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sejauhmana suatu kebijakan dapat merealisasikan tujuannya. Mulyasa mengemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan/sasaran, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin dapat dilihat sampai sejauhmana tujuan diberikannya Raskin tersebut, yakni untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras tercapai, kondisi seperti ini dapat dilihat dari :

1. Indikator Target Program Raskin

Indikator sasaran program ini bermaksud untuk melihat, apakah rumah tangga sasaran yang memperoleh raskin adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun persyaratan warga yang berhak menerima raskin adalah : luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m/orang; lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/kayu; dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari kayu/tembok tanpa plaster; tidak memiliki fasilitas buang besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; sumber penerangan tidak menggunakan listrik; sumber air minum berasal dari sumur/air hujan; bahan bakar untuk memasak adalah kayu/minyak tanah; mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari; tidak sanggup bayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; pendapatan dibawah Rp 600.000,00/bulan; pendidikan kepala keluarga tidak tamat SD; tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00.

Berdasarkan dari beberapa wawancara dan penggalian informasi di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan program raskin di Desa Kubang Jaya dari segi sasaran program adalah kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penerima Raskin yang tidak tepat sasaran, selain itu juga terjadi dalam hal pembagian raskin secara merata, baik kepada rumah tangga yang terdaftar sebagai RTS-PM, maupun kepada rumah tangga lainnya yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi kriteria miskin dari BPS. Disamping itu dapat diketahui juga bahwa pengelola tidak tegas dan hanya mencari aman dalam menetapkan dan membagikan raskin, hal ini terbukti pengelola masih merasa segan kepada warga yang terkategori mampu dan menjadikan warga tersebut sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin. Hal ini akan berdampak pada ketidaktepatan sasaran program raskin ini.

Fakta lainnya yang ditemukan penulis, bahwa pengelola di titik bagi yaitu pengelola di tingkat RT tidak mengetahui dan tidak memiliki daftar nama penerima tetap. Namun, setelah dikonfirmasi hal ini dengan pihak pemerintah desa, hal ini dikarenakan memang Desa Kubang Jaya telah melakukan musyawarah desa untuk tidak menggunakan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) program raskin yang telah ditetapkan BPS sebagai acuan atau pedoman dalam membagikan raskin. Karena menurut aparat desa, ketua RT yang lebih mengetahui tentang rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin yang benar-benar layak mendapatkan raskin tersebut. Namun yang terjadi ditingkat RT adalah membagikan raskin kepada siapa saja yang mau membeli raskin. Padahal menurut petunjuk teknis pelaksanaan program raskin Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 tahun 2011 dijelaskan bahwa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) harus sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM). Apabila terdapat perubahan data RTS-PM dalam Daftar Penerima Manfaat dapat

digantikan oleh Rumah Tangga Miskin lain yang dinilai layak dan ditetapkan melalui musyawarah desa.

2. Indikator Jumlah Raskin yang dibagikan

Indikator jumlah beras yang dibagikan ini bermaksud, untuk mengetahui apakah jumlah beras yang dibagikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 2011, yaitu sebesar 15Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180kg/RTS/tahun. Desa Kubang Jaya pada tahun 2012 periode Juni sampai dengan Desember yaitu sebesar 4,755 Kg/bulan dan 317 rumah tangga sasaran penerima manfaat. Mengenai jumlah beras yang dibagikan dapat dilihat dari tanggapan responden: Jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga sasaran ; apakah mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

Dari beberapa wawancara di atas dan penggalian informasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilihat dari jumlah beras raskin yang dibagikan pada RTS-PM adalah kurang efektif, karena hampir seluruh RTS-PM program Raskin di Desa Kubang Jaya menerima raskin dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Desa Kubang Jaya ini pembagian raskin dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sekali, berarti jika diakumulasikan sesuai ketentuan berlaku 15kg/bulan berarti setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan raskin sekitar 45kg/tiga bulan, namun rata-rata rumah tangga sasaran penerima manfaat memperoleh beras bersih 8kg/ tiga bulan.

Perbedaan jumlah raskin yang telah ditetapkan pemerintah dengan jumlah raskin yang diterima bersih oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat disebabkan oleh tidak digunakannya daftar penerima manfaat dari BPS sehingga rumah tangga sasaran bertambah banyak dan jatah jumlah raskin pun berkurang. Pengelola ditingkat RT cenderung membagi rata jumlah raskin kepada warganya yang dinilai layak. Dari beberapa hasil wawancara di atas terungkap bahwa jumlah raskin yang diterima oleh masing-masing masyarakat masih belum mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, namun walaupun demikian mereka pun mengakui hal itu cukup membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

3. Indikator waktu pembagian

Indikator waktu pembagian ini bermaksud untuk mengetahui apakah waktu pembagian raskin sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 2012 yaitu waktu pembagian raskin ke rumah tangga sasaran yaitu diberikan 1 kali untuk satu bulan atau sesuai waktu rencana distribusi, dengan ketentuan RTS-PM telah melunasi harga tebus raskin. Indikator waktu pembagian ini dapat dilihat dari bagaimana waktu pembagian dan penundaan waktu pembagian.

Dari beberapa wawancara di atas dan penggalian informasi di lapangan dapat diketahui bahwa waktu pembagian beras raskin yang dibagikan pada RTS-PM di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah efektif. Karena dalam proses pembagian beras raskin tersebut, sebagian besar responden tidak merasakan adanya penundaan waktu, dalam artian bahwa waktu pembagian beras raskin sesuai dengan rencana distribusi beras raskin ke Desa Kubang Jaya yaitu satu kali dalam tiga bulan. Masyarakat menganggap waktu pembagian itu sudah efektif karena mereka tidak pernah tahu kapan waktu pastinya pembagian raskin, hanya menunggu kabar dari pihak RT atau pengumuman dari mesjid saja, namun tetap satu kali dalam tiga bulan. Penulis juga menyimpulkan rumah tangga sasaran tidak terlalu bergantung pada beras

raskin ini untuk memenuhi ebutuhan makan sehari-hari, karena terbukti mereka pasrah saja dengan waktu dan jumlah raskin yang mereka terima.

4. Indikator Harga Tebus Beras

Indikator harga tebus beras ini bermaksud untuk mengetahui apakah harga tebus raskin sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 20122 yaitu sebesar Rp 1.600,00/Kg netto di titik distribusi. Beras raskin ini merupakan beras yang disubsidi pemerintah sehingga menjadi murah. Didalam Program Raskin terdapat istilah titik distribusi dan titik bagi.

Dari beberapa wawancara di atas dan penggalian informasi di lapangan dapat diketahui bahwa harga tebus beras raskin yang dibagikan pada RTS-PM di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum efektif. Karena selisih harga tebus beras yang ditetapkan dalam peraturan bupati Kampar tentang raskin sekitar Rp1.600/kg dengan harga tebus beras yang dikeluarkan rumah tangga sasaran penerima manfaat Rp 2.200,00 terlalu tinggi selisihnya, dengan totalitas Rp.600,00/kg untuk biaya operasional saja.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu organisasi, tidak sedikit pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Steers kerangka kerja yang dipakai dalam empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektivitas yaitu : faktor organisasi, lingkungan, pekerja, serta kebijakan.

Jadi berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa sedikitnya terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan yaitu faktor organisasi, faktor lingkungan, faktor pekerja dan faktor kebijakan. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, yaitu : 1). faktor organisasi dan 2). faktor pelaksana. Hal ini disebabkan faktor kebijakan merupakan bagian dari organisasi dan faktor lingkungan merupakan bagian dari faktor pelaksana.

1. Faktor Organisasi dalam Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Ciri organisasi yang yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi, faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai sejauh seberapa jauh para anggota organisasi dapat mengambil keputusan atau diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan yang yang membuka peluang bagi pekerja atau pelaksana untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya inovasi mereka. Faktor formalisasi berhubungan terhadap tingkat adaptasi organisasi dengan lingkungannya yang selalu berubah. Semakin formal suatu organisasi semakin sulit organisasi itu untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Faktor organisasi digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana faktor organisasi ini memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program raskin kepada masyarakat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui bagaimana organisasi mendukung pelaksanaan pembagian raskin di Desa Kubang Jaya, dimana kondisi demikian dapat dilihat dari: sampai sejauhmana masyarakat/rumah tangga sasaran mengetahui tujuan pembagian raskin; sampai sejauhmana sosialisasi ke masyarakat/rumah tangga sasaran. Untuk lebih jelasna dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a. Indikator Tujuan Program

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan. Kebijakan Program Raskin ini dibagikan kepada masyarakat atau rumah tangga sasaran memiliki tujuan yang jelas yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah terdaftar dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dan penggalan informasi penulis dilapangan dapat diketahui bahwa tujuan program raskin yang diberikan kepada rumah tangga penerima manfaat adalah sudah efektif. Dimana, tujuan dari program raskin seperti yang telah disebutkan diatas adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Namun walaupun sebagian besar responden mengatakan tujuan program raskin sudah efektif, masih ada juga responden yang mengatakan tujuan program raskin belum efektif karena pada pelaksanaannya belum tepat sasaran.

b. Indikator Sosialisasi dan Komunikasi

Dalam pelaksanaannya, program yang sudah disetujui perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan kemudian di dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat harus melakukan komunikasi dengan baik. Dalam hal ini pembagian raskin menuntut masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh penjelasan lebih detail mengenai siapa sasaran program atau yang berhak menerima raskin, syarat atau kriteria menerima raskin, jumlah beras yang dibagikan, harga tebus beras, prosedur pengambilan beras.

Sosialisasi program raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan program raskin. Melalui sosialisasi program raskin, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program raskin sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sosialisasi program raskin dapat dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dan penggalan informasi dilapangan dapat diketahui bahwa sosialisasi program Raskin di Desa Kubang Jaya untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat masih belum efektif. Karena masih banyak warga yang tidak tahu siapa sasaran program atau yang berhak menerima raskin, syarat atau kriteria menerima raskin, jumlah beras yang dibagikan, waktu pembagian raskin, harga tebus beras, prosedur pengambilan beras. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam indikator sebelumnya, dimana mereka hanya mendapat informasi dari Ketua RT saja. Sementara itu, organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program raskin ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan BPS sebagai organisasi penting dalam menetapkan rumah tangga sasaran, dari temuan dilapangan kurang menjalin hubungan komunikasi atau kurang berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa, RW maupun RT.

c. Indikator Struktur Birokrasi

Penanggung jawab program raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan program raskin di Provinsi adalah Gubernur, di

Kabupaten/kota adalah Bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dandi desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah. Perum BULOG sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran raskin dan bertugas dalam stabilisasi pangan nasional dalam rangka ketahanan pangan. Dimana organisasi ini melakukan koordinasi kepada instansi terkait seperti BPS (Badan Pusat Statistik).

Dari beberapa wawancara diatas dan penggalian informasi penulis dilapangan dapat diketahui bahwa struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan program raskin adalah belum efektif atau belum baik. Hal ini merupakan hasil dari tanggapan masyarakat, mereka sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal penerimaan raskin kebanyakan tidak mengetahui dari lembaga/organisasi apa beras raskin ini dikeluarkan. Mereka hanya menunggu pemberitahuan dari RT setempat kapan beras raskin bisa diambil. Selain itu pihak organisasi pelaksana program ini tidak memberitahukan kejelasan prosedur atau syarat penerimaan kepada mereka. Akibatnya responden kebanyakan tidak mengetahui apa prosedur atau syarat pengambilan beras raskin tersebut.

b. Deskripsi Faktor Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Berkaitan dengan faktor pelaksana, yang merupakan sumber daya yang melaksanakan program pembagian raskin ini, perlu dikaji keterkaitan atau pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan program raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hal ini sangat penting dilakukan karena faktor pelaksana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah implementasi program. Sebelum itu perlu diketahui bagaimana ketersediaan sumber daya dan sikapnya dalam mensukseskan program ini. Berikut disajikan data hasil wawancara dan observasi dilapangan yang dilakukan untuk mengungkap mengenai faktor pelaksana, sebagai berikut:

1. Indikator Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan program raskin kepada masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat sampai sejauhmana sumberdaya dilihat dari kuantitasnya. Dari beberapa hasil wawancara diatas dan penggalian informasi peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa indikator ketersediaan sumber daya dalam hal kuantitas pengelola adalah sudah efektif atau sudah memadai.

2. Indikator Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana ikut menentukan pelaksanaan program raskin kepada masyarakat. Pelaksana yang memberikan sikap mendukung akan memperlancar program, begitu pula sebaliknya. Sikap pelaksana ini dapat dilihat dari kemampuan pelaksana secara cepat, tepat dan tanggap dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara diatas dan penggalian informasi dilapangan dapat diketahui bahwa pelaksana program raskin dalam menjalankan tugasnya dalam kategori belum efektif. Dimana, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa sikap pelaksana yang kurang cekatan dalam melaksanakan pekerjaannya, hal ini berarti bahwa pelaksana belum efektif dalam membagikan beras raskin kepada rumah tangga penerima raskin

yang benar-benar berhak mendapatkan raskin, kurang tepat dalam membagikan dan kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dan peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka diperoleh kesimpulan dari indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu Sasaran Program Raskin, Jumlah beras raskin yang dibagikan, waktu pembagian dan harga tebus beras sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pembagian raskin tidak tepat sasaran, jumlah raskin yang dibagikan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Bupati Kampar, waktu pembagian raskin yang tidak menentu serta selisih harga tebus beras yang tinggi antara titik distribusi dengan titik bagi. Secara keseluruhan pelaksanaan program raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kurang sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 2011.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor organisasi yang memegang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pembagian raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat berdasarkan penelitian yang dilakukan kurang efektif. Hal ini berarti bahwa BPS, Bulog, dan Pemerintah sebagai organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan Program Raskin masih belum baik dalam melaksanakan tugasnya. Dimana, banyak masalah-masalah yang timbul akibat dari organisasi yang belum dengan baik memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat belum mengerti tujuan beras raskin diberikan kepada mereka, siapa yang lebih berhak mendapatkan raskin, berapa jumlah raskin dan harga tebus beras yang telah ditetapkan didalam pedoman umum dan petunjuk teknis berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 tahun 2011.
 - b. Faktor pelaksana, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa faktor pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dalam kategori kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaanya, jumlah pengelola masih belum cukup untuk melaksanakan tugas pembagian raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat, kemudian dapat dilihat juga dari sikap pelaksana yang kurang memahami tugas dalam melaksanakan pekerjaannya, hal ini berarti bahwa pelaksana kurang tepat sasaran dalam membagikan beras raskin dan kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. 2003. *Administrasi Publik*. Jakarta.
- Gibson L, James.1996. *Organisasi Jilid 1*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elek Media Komputindo. Jakarta.
- Robin, Stephen. 1994. *Teori Organisasi, Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Edisi 3. Arcan. Jakarta.
- Steers, Richard M. 1995. *Efektifitas Organisasi*. (Terjemahan : Magdalena jamin) Erlangga. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama. Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Usman, Husnaini dan Setiady, Purnomo. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta.
- Dunn, N William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Dokumen

- Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Pedoman Umum Raskin 2011
- Peraturan Bupati Kampar No. 04 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin (Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Kampar Tahun 2011

Tesis dan Skripsi

- As'ari, Hasim. 2007. *Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru.
- Mitra, Ariadi. 2010. *Efektifitas Program pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau*. Pekanbaru.